

**UPAYA INDONESIA DALAM PENGUATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
UNTUK MENGAHADAPI ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY* 2015 (STUDI KASUS:
INDUSTRI KECIL MENENGAH KERAJINAN KAYU BALI TAHUN 2010-2014)**

By: Indria Rizky Arafah
indriarizkyarafah@gmail.com

Dosen Pembimbing: **Afrizal, S.IP, MA**
Library of Riau University

Departemen of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R. Subrantas Km 12,5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

This research aims to provide more knowledge to students and public about the effort in conducting the Indonesian Government to strengthen the micro, small, and medium enterprises to confront the ASEAN Economic Community by 2015, particularly on small and medium industry of Bali's wood crafts in Bali.

The research method that used in this study is a qualitative method, which begins with collecting, arranging and enterprising data. This research is an explanatory that describes a problem, symptoms, policies, and actions. Based on the phenomenon that is used as the problems to be studied by the author. While the author uses theory of role and foreign policy, and globalization theory to answer the basic problems that the authors including in this writing. Level analysis that the author used in this research is nation-state.

The 2020 acceleration of ASEAN Economic Community to be coming 2015 is one of the seriousness from the fellow countries of ASEAN to realize the economic cooperation in Southeast Asia. Indonesia will be confronted with the opportunity and defiance at once when the ASEAN free trade enforced. To abuse the opportunity, Indonesia makes efforts in Micro, Small, and Medium Enterprises reinforcement with increase competitiveness Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia. Micro, Small, and Medium Enterprises is one of important sector in Indonesia that have to empowered, because it gave significant contribution in Indonesia's economic matters. Indonesia has prepare many various of program and wisdom to increase the Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises and Small Medium Industry competitiveness to confront the ASEAN Economic Community by 2015.

Key Word: ASEAN Economic Community 2015, Micro, Small, and Medium Enterprises, Small Medium Industry.

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam penguatan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) untuk menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015 dalam studi kasus upaya Pemerintah

Indonesia dalam penguatan (Industri Kecil Menengah) IKM kerajinan kayu Bali. Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah Bali dalam penguatan IKM kerajinan kayu Bali dalam rangka menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) 2015.

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu dari pilar perwujudan ASEAN Vision. AEC antara lain bertujuan untuk mencapai integrasi ekonomi dengan karakteristik: (a) pasar dan basis produksi yang tunggal, (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan adil, serta (d) kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN mentransformasi ASEAN menjadi satu kawasan ekonomi sehingga ada kebebasan untuk menggerakkan barang, jasa, investasi, tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kapital.

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan ASEAN *Economic Community* (AEC) 2015 menetapkan sembilan sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka pelaksanaan Komunitas Ekonomi Asean (*Asean Economic Community*/ AEC) yang berlaku di 2015.¹ Sembilan sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN, yaitu industri berbasis agro (CPO, kakao, karet), olahan ikan, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), alas kaki, kulit dan barang kulit, furniture, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, industri mesin dan peralatannya serta industri logam dasar, besi dan baja. Sedangkan produk yang berpotensi menjadi unggulan antara lain: kulit dan hasilnya, alat medis,

obat-obatan herbal, makanan olahan, *essential oil*, ikan dan produk olahannya, kerajinan, perhiasan, bumbu-bumbu, dan alat tulis selain kertas.²

Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang memiliki sektor industri yang berkembang sangat pesat. Perkembangan sektor industri di Provinsi Bali masih berbasis pada sektor industri tanpa migas, yaitu pada industri kecil dan menengah. Bali dikenal sebagai daerah pariwisata yang menjadi perhatian utama para pelancong baik dari mancanegara maupun dari dalam negeri, selain itu Bali juga dikenal sebagai penghasil komoditas untuk di ekspor. Sebagian besar ekspor dari Bali kesepuluh negara ASEAN merupakan produk kerajinan.³ Komoditi yang banyak dijumpai di Bali adalah hasil kerajinan seperti kerajinan bambu, kerajinan kayu, *furniture*, maupun kulit.

Provinsi Bali selain sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang sangat terkenal, juga memiliki potensi yang besar pada perdagangan kerajinan kayu. Industri kerajinan kayu di Provinsi Bali lebih banyak dikuasai oleh industri menengah. Sentra-sentra kerajinan kayu tersebar di Sembilan kabupaten dan kota di Bali, diantaranya Kabupaten Gianyar, Bangli, Badung, Klungkung, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar. Daerah pemasaran kerajinan kayu ini adalah pasar lokal dan pasar ekspor. Bentuk dan kerajinan kayu sangat variatif dengan jumlah yang relative banyak. Patung dan aneka jenis cinderamata hasil kerajinan dari bahan baku kayu,

¹ Deny, Septian. 9 Industri Andalan RI Hadapi Komunitas Ekonomi ASEAN, pada: <http://bisnis.liputan6.com/read/753749/9-industri-andalan-ri-hadapi-komunitas-ekonomi-asean>, diakses pada tanggal 12 April 2014.

² Majalah Tabloid Diplomasi pada: <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/197-diplomasi-oktober-2013/1720-pengembangan-industri-unggulan-untuk-mengisi-pasar-asean.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2014.

³ Hasil Industri dan Kerajinan Penopang utama Ekspor Bali pada Januari 2012, pada: http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/4f96267a-92d0-4c46-9439-2f950a1e1e48, diakses pada tanggal 1 Oktober 2014.

yang merupakan sentuhan tangan-tangan terampil seniman dan perajin Bali mampu bersaing di pasaran ekspor. Eksportir terbesar kerajinan kayu Bali diantaranya adalah negara-negara Uni Eropa seperti Inggris, Amerika, Spanyol, Prancis dan Jerman. Selain itu Australia, Afrika Selatan dan negara-negara Asia juga turut menyumbang devisa bagi negara dengan mengekspor produk kerajinan asli Indonesia ini.

Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori peran dan kebijakan luar negeri serta teori globalisasi. Teori peran menegaskan bahwa “perilaku politik... adalah perilaku dalam menjalankan peran politik”.⁴ Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik.⁵ Sedangkan teori kebijakan luar negeri, menurut William D. Coplin konsep pembuatan kebijakan luar negeri adalah wujud mekanisme dalam memperjuangkan dan merealisasikan kepentingan-kepentingan nasional suatu bangsa memperhatikan kaedah-kaedah internasional.

Selain teori peran dan kebijakan luar negeri, penulis juga menggunakan teori globalisasi untuk menjawab pokok permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini, dimana teori ini dapat menjelaskan mengenai kondisi yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya yakni menghadapi tantangan pasar global ASEAN. Kerjasama regional seperti ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan salah satu wujud dari globalisasi di era modern ini. Anthony Giddens di dalam *The Consequences of Modernity* mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial

dunia yang menghubungkan tempat-tempat jauh sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain sekian kilometer jauhnya dan sebaliknya.⁶ Sementara Manfred Steger, dosen studi global dan ketua riset di *Global Cities Institute* di RMIT University, mengidentifikasi empat dimensi globalisasi empiris utama: ekonomi, politik, budaya, dan ekologi, ditambah dimensi kelima (ideologi) yang melintasi empat dimensi lainnya.⁷

Penulis menggunakan level analisis negara-bangsa untuk mendeskripsikan maupun menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam penguatan UMKM untuk menghadapi ASEAN *Economic Community* (AEC) 2015, dalam studi kasus IKM kerajinan kayu Bali pada tahun 2010 hingga 2013. Penggunaan tingkat analisis negara-bangsa dalam penelitian ini merujuk pada Pemerintah Republik Indonesia. Menurut Mohtar Mas’oed, pada level analisis negara-bangsa penelaahan difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri, oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh.⁸

Pembahasan

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN memiliki peran yang cukup penting dibidang ekonomi maupun politik. Pada tahun 1967, Indonesia menjadi salah satu “*founding countries*” penandatanganan deklarasi Bangkok yang menandai pembentuknya ASEAN. Pada tahun itu Indonesia berhasil memberikan landasan yang kuat ditengah konstelasi global yang ditandai oleh Perang Dingin, melalui kesepakatan *Bali*

⁴ Mohtar Mas’oed. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teoritisasi*. PUSS-UGM, Yogyakarta. Hal. 44.

⁵ *Loc. Cit.*

⁶ Giddens, Anthony. (1991). *The Consequences of Modernity Cambridge: Polity Press*. Hal. 64. ISBN 9780745609232

⁷ Steger, Manfred (2009). *Globalization: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press. Hal. 11. ISBN 978-0-19-955226-9.

⁸ Mohtar Mas’oed, *Op.cit.* Yogyakarta. Hal. 44.

Concord I. Kemudian Indonesia kembali memberikan landasan yang kuat bagi proses transformasi ASEAN mejadi suatu organsasi yang *rules-based* dan berorientasi kepada masyarakat melalui kesepakatan *Bali Concord II* pada tahun 2003. Di tahun 2011, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN. Pada massanya menjadi ketua ASEAN, Indonesia telah memberikan gagasan yang dituangkan pada pilar ASEAN *Economy Community* yaitu mewujudkan ASEAN *Framework on Equitable Economic Development* (EED).⁹

Diberlakukannya ASEAN *Economic Community* pada tahun 2015 oleh negara-negara ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyatnya secara bersama-sama, mengingat cara ini merupakan opsi yang paling efisien dibandingkan bila upaya peningkatan kemakmuran dilakukan secara unilateral. Oleh karenanya pencapaian AEC dilakukan melalui empat tahapan strategis, meliputi : pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global.¹⁰ Berdasarkan pilar pertama ASEAN tersebut, maka dapat dikatakan bahwa AEC sebagai salah satu peluang pasar dan basis produksi yang menjanjikan bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Globalisasi ekonomi terutama implementasi AEC dapat menciptakan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan produksi produk UMKM

⁹Jurnal Kajian Lemhannas RI. Edisi 16. November 2013. Hal. 57. Pdf. Dalam <www.lemhannas.go.id>, diakses pada tanggal 16 Februari 2015

¹⁰ Masyarakat Ekonomi ASEAN Peluang Atau Ancaman, dalam <<http://dimastidano.wordpress.com/2012/11/28/masyarakat-ekonomi-asean-2015-peluang-atau-14ancaman/>>, diakses pada tanggal 25 Februari 2013.

mengingat pasar ASEAN yang sangat besar. Pasar ASEAN sebesar 600 juta, dengan jumlah kelas menengah ASEAN berjumlah 24% pada 2010 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 65% pada 2030 akan menjadi peluang ekspor yang sangat besar bagi produk UMKM Indonesia. Integrasi ekonomi dalam AEC tidak hanya mendatangkan peluang, melainkan juga sekaligus menjadi tantangan bagi pelaku usaha nasional baik itu BUMN, swasta, koperasi, maupun UMKM. Adapun bentuk tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam mengadapi AEC, seperti; daya saing sektor prioritas integrasi; dan daya saing sumber daya manusia.¹¹ Sementara bagi pelaku UMKM, terdapat beberapa tantangan serta hambatan yang harus dihadapi dalam menghadapi AEC 2015, diantaranya adalah tantangan dalam kelengkapan infrastruktur (sarana-prasarana) bagi para pelaku UMKM/IKM dan tantangan regulasi (kebijakan).

Dalam melihat kesiapan Indonesia menghadapi AEC 2015, World Economic Forum menunjukkan tingkat daya saing global Indonesia dengan Negara-negara ASEAN lainnya. Dibawah ini adalah tabel indeks daya saing Indonesia dan Negara-negara ASEAN lainnya di tingkt global pada ttahun 2013-2014.

Tabel 4.1

Indeks Daya Saing Negara-Negara Anggota ASEAN Tahun 2013–2014

| No | Negara | Rank | Score |
|----|-------------------|------|-------|
| 1. | Singapore | 2 | 5.61 |
| 2. | Malaysia | 24 | 5.03 |
| 3. | Brunei Darussalam | 26 | 4.95 |
| 4. | Thailand | 37 | 4.54 |
| 5. | Indonesia | 38 | 4.53 |

¹¹ Hasan Wirayuda. 2005. *Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. Jurnal Analisis CSIS Vol. 34.No.3, hlm 78.

| | | | |
|-----|-------------|-----|------|
| 6. | Philipines | 48 | 4.08 |
| 7. | Vietnam | 59 | 4,29 |
| 8. | Laos | 70 | 4.18 |
| 9. | Kamboja | 88 | 4.01 |
| 10. | Timor Leste | 138 | 3.25 |
| 11. | Myanmar | 139 | 3.23 |

Sumber: World Economic Forum (2013)

Berdasarkan tabel diatas, dari sebelas negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke lima dan berada pada peringkat ke 38 di global dari 148 negara. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Indonesia masih kalah saing untuk melaksanakan investasi dari 4 negara ASEAN lainnya yang berada di posisi atasnya, yakni Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Penilaian dalam menentukan daya saing global di dasarkan dari beberapa pilar, diantaranya; pengelolaan institusi yang baik, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi.¹²

UMKM di ASEAN merupakan tulang punggung dari perekonomian ASEAN dan pengembangan UMKM merupakan bagian integral untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan.¹³ Sementara bagi Indonesia, UMKM memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2012 tercatat UMKM mampu menyerap tenaga

kerja sebesar 107.657.509 jiwa, ini meningkat dari tahun 2011 yakni 2,33% menjadi 5,83% ditahun 2012.¹⁴ Selain itu, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan beberapa tahun belakangan. Menurut BPS, pada tahun 2011 pertumbuhan sumbangan PDB UMKM terhadap PDB nasional meningkat dari tahun sebelumnya yakni dari 5,77% menjadi 6,76% yakni sebesar Rp. 1.369.326,00 Miliar, dan meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.504.928,20 Miliar dengan pertumbuhan sekitar 9,90%.¹⁵ Berdasarkan alasan diatas, maka sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat sector UMKM dalam menghadapi AEC 2015.

IKM merupakan bagian dari sektor UMKM yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah Indonesia. UMKM bidang industri memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini terbukti dengan perkembangan IKM pada beberapa tahun belakangan terus mengalami peningkatan, baik dari segi unit usaha, tenaga kerja maupun nilai produksinya.

Sektor yang paling penting untuk dikembangkan dalam menghadapi AEC 2015 adalah yang terkait dengan industri kreatif dan inovatif, handicraft, home industri dan teknologi informasi.¹⁶ IKM daerah dari sektor industri kreatif dan inovatif, handicraft, home industri akan diberdayakan dengan baik, karena nantinya produk-produk dari industri inilah yang akan menunjukkan keunikan atau khas dalam negeri. Produk khas dalam negeri dipandang akan mampu

¹² Simamora, Dominika. 2015. *Kesiapan Pemerintah Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 Dalam Sektor Tenaga Kerja Berdasarkan ASEAN Qualification Framework*. FISIP. Universitas Riau.

¹³ Jurnal Kajian Lemhannas RI. Edisi 16. November 2013. Hal. 61. Pdf. <www.lemhannas.go.id>, diakses pada tanggal 16 Februari 2015

¹⁴ Pertumbuhan UMKM Indonesia, dalam <<http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/index.php/linkTabelStatis/1322>>, diakses pada tanggal 7 Maret 2015.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Kesiapan Koperasi-UKM Indonesia Menatap era MEA 2015, dalam <<http://m.antaranews.com/berita/436319-Kesiapan-Koperasi-UKM-Indonesia-Menatap-era-MEA-2015>>, diakses pada tanggal 5 Maret 2015.

menjadi produk yang diminati di pasar bebas ASEAN nantinya. Industri kerajinan merupakan salah satu sub sektor yang difokuskan. Salah satu contoh adalah industri kerajinan ukir kayu Bali. Berdasarkan data dari dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Bali, produk kerajinan kayu Bali merupakan salah satu produk kerajinan yang diminati oleh negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Pada triwulan pertama di tahun 2014, tercatat sebanyak 207.103 unit dengan nilai US\$ 772.402,14 kerajinan kayu Bali di ekspor ke Negara-negara ASEAN.¹⁷

Dalam rangka menghadapi AEC, kementerian KUMKM dan Kementerian Perindustrian sebagai cabang dari sektor UMKM, diberikan tanggung jawab oleh Presiden untuk mengupayakan peningkatan daya saing dan penguatan UMKM dalam menghadapi AEC 2015. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan daya saing dan penguatan UMKM dalam rangka menghadapi AEC 2015, yakni; Peningkatan wawasan pelaku UMKM terhadap ASEAN Economic Community 2015; Peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha; Peningkatan daya serap pasar produk UMKM lokal; Penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Dalam rangka merealisasikan upaya-upaya tersebut, pemerintah pusat maupun daerah telah menyiapkan program-program guna membangun daya saing UMKM dan IKM nasional. Adapun program yang telah terealisasi oleh pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas UMKM untuk menghadapi AEC 2015, diantaranya :

1. Pelatihan dan Sosialisasi AEC 2015 bagi Pelaku UMKM

Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah baik pusat maupun daerah gencar melakukan berbagai pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM baik yang bersifat manajerial maupun teknis. Salah satu program pelatihan yang telah berjalan yakni, pelatihan yang diadakan oleh Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM). Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas pelaku KUMKM agar bisa masuk ke pasar ritel modern dan bersaing di pasar bebas ASEAN.

Disamping mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM, pemerintah juga mensosialisasikan AEC 2015 bagi masyarakat dan Pelaku UMKM, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan wawasan pelaku UMKM terhadap AEC 2015. Sosialisasi AEC ini dilakukan dengan pengadaan seminar-seminar yang bertepatan ASEAN *Economic Community* 2015.

2. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)

Program ini merupakan salah satu gerakan '*Nation Branding*' bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementerian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti kerajinan, busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya.¹⁸

3. Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable*. Maksudnya

¹⁷ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, dalam <<http://www.disperindagbali.go.id/export.php>>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2014.

¹⁸ Sholeh.Persiapan Indonesia Menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2012.eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522ISSN: 0000-0000, hal. 10, dalam <www.ejournal.hi.fisip-unmul.org>, diakses pada tanggal 10 Februari 2015.

adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. KUR ini diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan Koperasi. Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong Perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.¹⁹

4. Penerapan SNI Bagi Produk IKM

Penerapan SNI bagi produk IKM merupakan program yang sedang diupayakan oleh kadin (kamar dagang dan perindustrian) Indonesia yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk IKM.

5. Restrukturisasi Mesin dan Peralatan

Program restrukturisasi mesin dan peralatan ini berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 48/M-IND/PER/6/2014, yakni Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan Menengah. Maksud dari restrukturisasi mesin dan peralatan adalah penggantian dan penambahan mesin atau peralatan IKM yang lebih efisien dan produktif untuk menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing.²⁰

6. Pameran KUMKM dan IKM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin telah mengadakan mengadakan beberapa program, antara

lainnya adalah ‘Pameran Koperasi dan UKM Festival’ pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usahakecil serta menengah.²¹

Tidak hanya di Indonesia, pameran UMKM/IKM juga diadakan di luar negeri guna memperkenalkan produk-produk nasional di pasar internasional. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian senantiasa berupaya untuk memfasilitasi keikutsertaan perusahaan manufaktur nasional pada kegiatan pameran.

Sementara itu, adapun program dari Pemerintah Daerah Bali dalam Penguatan UMKM dan IKM terutama dalam upaya pengembangan daya saing UMKM dan IKM daerah Provinsi Bali :

1. Pelatihan Pelaku UMKM dan IKM Provinsi Bali

Pelatihan terhadap pelaku UMKM/IKM Provinsi Bali diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas ASEAN.²² Pelatihan ini diikuti oleh sebanyak 360.000 pelaku UMKM/IKM Bali. Sasaran pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Bali tidak hanya di tujukan untuk pelaku UMKM/IKM di Bali, namun juga untuk calon wirausaha muda, baik dari kalangan mahasiswa, keluarga petani, keluarga nelayan, dan kelompok strategis lainnya. Program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) adalah salah satu pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Bali

¹⁹ Kredit Usaha Rakyat, dalam <www.depkop.go.id>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015

²⁰ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan Menengah. pdf, dalam <http://regulasi.kemenperin.go.id/site/download_peraturan/1851>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

²¹ Pameran Koperasi dan UKM Festival, dalam <www.depkop.go.id>, diakses pada tanggal 16 Maret 2013.

²² Diskop Bali Bina 260.00 UKM Hadapi MEA, dalam <<http://metroballi.com/2015/02/06/diskop-ali-bina-260-000-ukm-hadapi-mea/>>, diakses pada tanggal 7 Maret 2015.

yang mana bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat Bali.

2. Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan program dari pemerintah Bali yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali bekerjasama dengan instansi terkait diseluruh kabupaten/kota dalam rangka mempromosikan kayu legal, penegakan hukum dan tata kelola kehutanan, mendorong sektor swasta menerapkan kebijakan terkait pasokan kayu legal, meningkatkan pangsa pasar untuk *Green Consumer* dalam perdagangan baik dalam maupun luar negeri serta mendukung *Bali Clean and Green*.

SVLK ini bisa dibilang sebagai *National Brand* Indonesia di mata dunia internasional serta dapat mendukung *Sustainable Trade*. SVLK dapat membantu para pelaku IKM perkayuan, seperti IKM *Furniture*, Kerajinan Kayu, dan lain sebagainya untuk dapat meningkatkan penjualan karena banyak permintaan dari negara-negara pengimpor baik dari Asia maupun Eropa yang meminta produk-produk dengan bersertifikat kayu legal.

3. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Bali

Pemerintah Daerah Provinsi Bali mendirikan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Bali pada tanggal 21 November 2010 dengan nama PT. Jamkrida Bali Mandara. Jamkrida Bali Mandara ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha bagi UMKM yang usahanya layak namun kesulitan mengakses kredit karena keterbatasan agunan (jaminan fiskal atau *collateral*).

4. Pameran Produk Kerajinan Bali

Mengatasi persoalan pemasaran produk-produk kerajinan UMKM/IKM di Bali dalam rangka menghadapi pasar bebas ASEAN 2015, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memberi peluang pengerajin

dalam negeri untuk memamerkan hasil kerajinannya dalam Pameran kerajinan dalam negeri yang di gelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Pameran ini bertajuk Bali Mandara Mahalango dan diikuti oleh 100 Pengerajin yang semuanya mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten/Kota. Masing-masing peserta di ambil 17 pengerajin di setiap kabupaten/kota di Bali. Tujuan dilaksanakannya pameran ini tentu saja untuk membangkitkan rasa bangga terhadap produksi dalam negeri, di samping pula sebagai ajang pertukaran informasi serta interaksi bisnis, disini antara pemilik produk dan konsumen bisa bertemu langsung menjalin kesepakatan bisnis.²³

Simpulan

Kerjasama Regional Ekonomi negara-negara ASEAN dalam kerangka ASEAN *Economic Community* 2015 bagi Indonesia mendatangkan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Untuk menghadapi peluang dan tantangan tersebut pemerintah Indonesia telah menyiapkan strategi, salah satunya adalah dengan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran dan kontribusi cukup besar bagi perekonomian nasional. UMKM di Indonesia berkontribusi sebagai sarana yang berpotensi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan pada beberapa tahun terakhir.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penguatan UMKM adalah dengan meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan daya saing UMKM dalam rangka menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015

²³ Saatnya Cintai Produk Dalam Negeri, dalam <www.disperindagbali.go.id>, diakses pada tanggal 7 Maret 2015.

adalah dengan; peningkatan wawasan pelaku UMKM terhadap AEC 2015; peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha; peningkatan daya serap pasar produk UMKM lokal; dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dari upaya-upaya tersebut pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah telah menyiapkan beberapa program yang mana bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal:

Jurnal Kajian Lemhannas RI. Edisi 16. November 2013. Hal. 61. Pdf. <www.lemhannas.go.id>, diakses pada tanggal 16 Februari 2015.

Hasan Wirayuda. 2005. *Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. Jurnal Analisis CSIS Vol. 34.No.3

Sholeh. Persiapan Indonesia Menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2012. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522 ISSN: 0000-0000, hal. 10, dalam <www.ejournal.hi.fisip-unmul.org>, diakses pada tanggal 10 Februari 2015.

Buku:

Mohtar Mas'ood. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisi*. PUSS-UGM, Yogyakarta

Simamora, Dominika. 2015. *Kesiapan Pemerintah Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 Dalam Sektor Tenaga Kerja Berdasarkan ASEAN Qualification Framework*. FISIP. Universitas Riau.

Giddens, Anthony. (1991). *The Consequences of Modernity* Cambridge: Polity Press. Hal. 64. ISBN 9780745609232

Steger, Manfred (2009). *Globalization: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press. Hal. 11. ISBN 978-0-19-955226-9.

Website:

Deny, Septian. 9 Industri Andalan RI Hadapi Komunitas Ekonomi ASEAN, pada: <http://bisnis.liputan6.com/read/753749/9-industri-andalan-ri-hadapi-komunitas-ekonomi-asean>, diakses pada tanggal 12 April 2014.

Majalah Tabloid Diplomasi pada: <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/197-diplomasi-oktober-2013/1720-pengembangan-industri-unggulan-untuk-mengisi-pasar-asean.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2014.

Hasil Industri dan Kerajinan Penopang utama Ekspor Bali pada Januari 2012, pada: http://dipen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/4f96267a-92d0-4c46-9439-2f950a1e1e48, diakses pada tanggal 1 Oktober 2014.

Masyarakat Ekonomi ASEAN Peluang Atau Ancaman, dalam <<http://dimastidano.wordpress.com/2012/11/28/masyarakat-ekonomi-asean-2015-peluang-atau-14ancaman/>>, diakses pada tanggal 25 Februari 2013.

Pertumbuhan UMKM Indonesia, dalam <<http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/index.php/linkTabelStatis/13>>

22>, diakses pada tanggal 7 Maret 2015.

<www.disperindagbali.go.id>, diakses pada tanggal 7 Maret 2015.

Kesiapan Koperasi-UKM Indonesia Menatap era MEA 2015, dalam <<http://m.antaranews.com/berita/436319-Kesiapan-Koperasi-UKM-Indonesia-Menatap-era-MEA-2015>>, diakses pada tanggal 5 Maret 2015.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, dalam <<http://www.disperindagbali.go.id/export.php>>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2014.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, diaksas dalam <depkop.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2015.

Kredit Usaha Rakyat, dalam <www.depkop.go.id>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan Menengah. pdf, dalam <http://regulasi.kemenperin.go.id/site/download_peraturan/1851>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

Pameran Koperasi dan UKM Festival, dalam <www.depkop.go.id>, diakses pada tanggal 16 Maret 2013.

Diskop Bali Bina 260.00 UKM Hadapi MEA, dalam <<http://metroballi.com/2015/02/06/diskop-ali-bina-260-000-ukm-hadapi-mea/>>, diakses pada tanggal 7 Maret 2015.

Saatnya Cintai Produk Dalam Negeri, dalam